

BAB VI

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nagekeo terhadap Program Kegiatan DAK Fisik Peningkatan Jalan di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2019 maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi. Dalam tahap ini sudah terlaksana dengan baik, dimana terlaksananya pemantau terhadap pelaksanaan kegiatan hingga Penilaian dan mengevaluasi atas efektivitas suatu program/kegiatan.
2. Reviu. Pada tahap ini pencairan dana DAK sudah sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: PER-6/PK/2018).
3. Audit. Pada tahap ini Inspektorat Kabupaten Nagekeo belum melakukan kegiatan audit atas DAK Fisik peningkatan/pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2019.
4. Tindak Lanjut hasil reviu dan hasil audit. Pada tahap ini tindak lanjut hasil reviu sudah dilakukan seiring kegiatan reviu berjalan, sedangkan hasil audit belum ada tindak lanjut , karena kegiatan audit belum dilaksanakan.

1.2 SARAN

1. Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo, melalui Inspektorat Kabupaten Nagekeo diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan baik, agar

setiap tahap pengawasan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan pemanfaatan DAK Fisik seharusnya digunakan dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas dan perencanaan pada kegiatan peningkatan jalan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar menjadi acuan dan informasi tambahan dalam meneliti pelaksanaan pengawasan keuangan program kegiatan DAK Fisik peningkatan Jalan pada Inspektorat Kabupaten Nagekeo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007). *Teori dan Metode Pengawasan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Abdul Halim. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Halim dkk, (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Al-Amin Mufham (2006). *Manajemen Pengawasan*, Ciputat: Kalam Indonesia.
- Arifin, Zainal (2014). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ardhani, Pungky (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darise, Nurlan (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Indeks.
- Eva Wafda Hidayati (2016). *Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dengan Pengadaan Fasilitas di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batang Tahun 2015*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Elia Roziana (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah eks-Karesidenan Surakarta*.
- Effendi, Usman (2014). *Asas-Asas Manajemen*. Depok: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Fitry Muawiyah (2013). *Analisis Transparansi Informasi Publik Dinas Bina Marga Dalam Pembangunan Infrastruktur (Jalan) (Studi Kasus Di Kecamatan Suka Makmue)*.
- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Salemba Empat.
- Hidayah & Setiyawati (2014). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah* *Jurnal Akuntansi*/Volume XVIII, No. 01, Januari 2014: 45-58. Nurul Hidayah & Hari Setiyawati Universitas Mercu Buana Jakarta Email: nurulbadawi@yahoo.com.

- J. Kodoatie, Robert (2005). Pengantar Manajemen Infrastruktur Edisi Revisi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mia Rachmawati (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Di Provinsi Papua Dan Papua Barat).
- Ni Luh Dina Selvia Martina, Wayan Cipta dan I Wayan Suwendra (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Volume 2 Tahun 2014 Singaraja.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Atika (2016). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (Dak) Tahun Anggaran 2015 Di Kecamatan Bintang Timur Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintang.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No.21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Pemerintah No. 79 Pasal 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Risa Roga, "Habiskan RP 11 Miliar Lebih, Proyek Jalan Fataleke-Koekobho di Nagekeo Belum Tuntas" Flores Pos, 08 Januari, 2020.
- Siagian, Sondang., P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Sujarweni V. Wiratna (2015). Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara